

## **RINGKASAN**

**YOHANNA BR HUTAURUK**  
**NIM 220510085**

**KEWENANGAN HAKIM DALAM  
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP  
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
TATA NEGARA**

**(Dr. Yusrizal, S.H., M.H dan Dr. Elidar  
Sari, S.H., M.H)**

Kewenangan hakim bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh hukum, syarat diversi, prosedur peradilan anak, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pelaksanaannya merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan masa depan anak. Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan hakim dalam penerapan diversi terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim memiliki kewenangan untuk mengupayakan diversi pada tingkat pemeriksaan di pengadilan dan menindaklanjuti hasil kesepakatan diversi sesuai dengan ketentuan hukum. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, prosedur yang berlaku, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dari perspektif Hukum Tata Negara, kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum dan harus dilaksanakan secara independen namun tetap berdasarkan hukum serta menjamin perlindungan hak anak. Diharapkan kepada hakim dalam menerapkan diversi dapat lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta memastikan bahwa pelaksanaan diversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum dan pihak terkait agar penerapan diversi dapat berjalan secara efektif, adil, dan mampu mewujudkan tujuan keadilan restoratif serta perlindungan terhadap anak.

**Kata Kunci : Kewenangan Hakim, Diversi, Anak, Kekuasaan Kehakiman,  
Kepentingan Terbaik Anak.**

## SUMMARY

**YOHANNA BR HUTAURUK**  
**NIM 220510085**

***THE AUTHORITY OF JUDGES IN THE  
IMPLEMENTATION OF DIVERSION  
FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH  
THE LAW FROM THE PERSPECTIVE  
OF CONSTITUTIONAL LAW.***

**(Dr. Yusrizal, S.H., M.H and Dr. Elidar  
Sari, S.H., M.H)**

*The authority of judges is derived from the 1945 Constitution, Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. This authority is not absolute because it is limited by law, diversion requirements, juvenile justice procedures, and the best interests of the child. Its implementation is part of judicial power in upholding law and justice while protecting the child's rights and future. This research uses normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The results show that judges' authority in implementing diversion is primarily regulated under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Judges have the authority to facilitate diversion at the court examination stage and to follow up on diversion agreements in accordance with the applicable legal provisions. The exercise of this authority must comply with statutory regulations, applicable procedures, restorative justice, and the best interests of the child. From the perspective of Constitutional Law, such authority constitutes part of the exercise of judicial power within a state based on the rule of law and must be exercised independently while remaining subject to the law and ensuring the protection of children's rights. It is expected that judges, in implementing diversion, prioritize the best interests of the child and ensure that the implementation of diversion is in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. In addition, good cooperation among law enforcement officials and relevant parties is necessary so that diversion can be implemented effectively and fairly, while achieving the objectives of restorative justice and child protection.*

***Keywords: Judicial Authority, Diversion, Children in Conflict with the Law, Judicial Power, Best Interests of the Child.***